

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting untuk digunakan dalam menganalisis pembangunan ekonomi dalam suatu negara. Karena pertumbuhan ekonomi dapat menggambarkan kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional.

Indonesia sebagai salah satu negara sedang berkembang mempunyai karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan negara sedang berkembang lainnya. Dimana dalam proses pembangunannya dihadapkan pada permasalahan dalam keterbatasan modal untuk membiayai investasi pembangunan demi tujuan pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

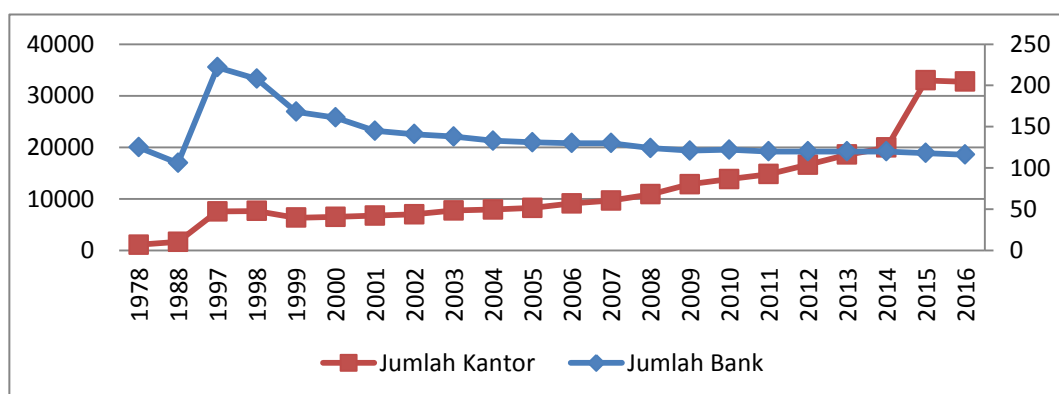
Menurut Baroroh (2012) pembangunan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari sektor keuangan. Karena sektor keuangan berperan penting dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Suatu negara dengan perkembangan sektor keuangan yang baik, akan mendorong kegiatan perekonomian dan akan memicu pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya sektor keuangan yang tidak berkembang dengan baik akan menyebabkan perekonomian mengalami hambatan likuiditas dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Perkembangan sektor keuangan tidak bisa terlepas dari perkembangan perekonomian suatu negara. Pada awal tahun 1980-an harga minyak mengalami penurunan yang akhirnya berpengaruh terhadap kinerja perekonomian

Indonesia. Pada saat itu pendapatan dari minyak menurun sedangkan pemerintah membutuhkan mobilisasi dana dari dalam negeri untuk pembiayaan pembangunan. Karena perekonomian Indonesia yang masih tergantung pada subsidi pemerintah dan begitu pula perbankan Indonesia. Sumber dana perbankan yang mayoritas masih berasal dari KLBI dan kredit perbankan yang mayoritas masih berupa kredit program juga ikut terancam oleh penurunan harga migas. Hal inilah yang kemudian menjadi latar belakang adanya deregulasi pada berbagai sektor perekonomian termasuk sektor keuangan.

Kebijakan deregulasi sektor keuangan pada era dasawarsa 1980-an yang terpenting diantaranya adalah Paket Juni 1983 yang menitikberatkan pada pemberian kebebasan pada bank untuk menetapkan suku bunga, selanjutnya Paket Oktober 1988 yang menitikberatkan pada usaha dalam meningkatkan kompetisi pada sektor keuangan dengan memberikan kemudahan dalam pendirian bank-bank baru. Kedua deregulasi tersebutlah yang kemudian menjadi latar belakang dari perkembangan sektor keuangan di Indonesia.

Perkembangan tersebut salah satunya dapat dilihat berdasarkan perubahan jumlah bank dan kantor bank yang terdapat pada Gambar 1.1



Gambar 1.1 Perkembangan Jumlah Bank dan Kantor Bank Umum di Indonesia (1997-2016)

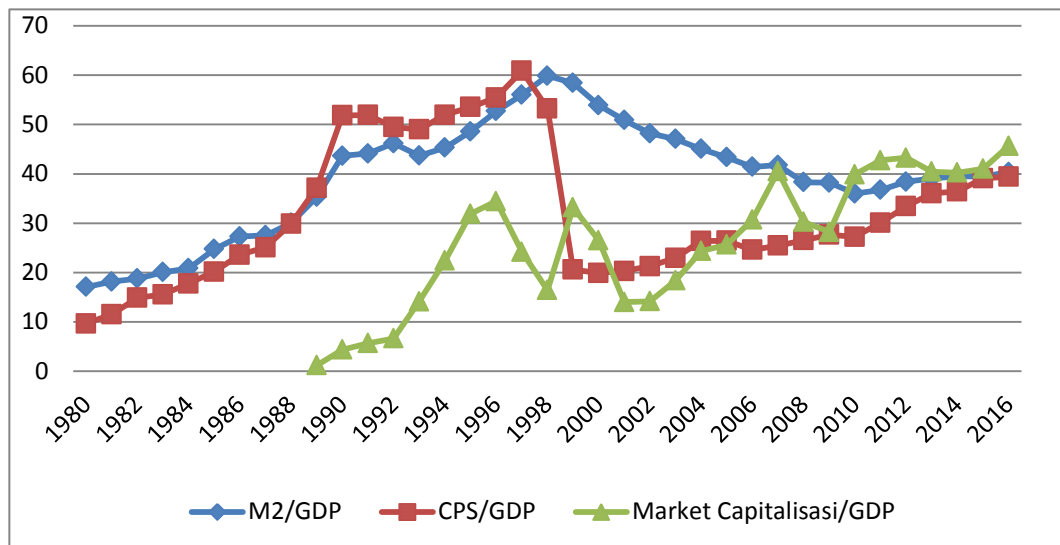
Sumber: Statistik Perbankan Indonesia Tahun 1997-2016 (diolah)

Berdasarkan Gambar 1.1 sebelum tahun 1988 jumlahnya tidak mengalami peningkatan yang cukup berarti yakni sekitar 125 bank dan 1115 kantor bank di tahun 1978. Namun sejak tahun 1988 yang merupakan awal pemberlakuan Paket Kebijakan Deregulasi Oktober (PAKTO) jumlah bank maupun kantor bank mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 222 bank dan 7570 kantor bank di tahun 1997. Namun ditahun-tahun berikutnya jumlah bank mengalami penurunan secara perlahan akan tetapi disisi lain jumlah kantor bank terus mengalami peningkatan hingga mencapai 32.730 kantor bank di tahun 2016.

Selain pemberlakuan kebijakan deregulasi pada perbankan nasional, upaya pemberlakuan kebijakan deregulasi juga dilakukan pada institusi keuangan non bank (pasar modal). Kebijakan deregulasi tersebut yakni Paket desember 88 yang pada dasarnya memberikan dorongan lebih besar pada pasar modal dengan membuka peluang untuk swasta menyelenggarakan bursa. Dalam deregulasi ini pada intinya adalah memberikan kemudahan bagi investor untuk masuk ke bursa dengan menghapus hambatan yang ada.

Menurut Ruslan (2011) upaya yang dilakukan tersebut dimaksudkan agar tercipta *financial deepening* dalam perkembangan peran sektor keuangan dalam perekonomian nasional. Apabila *financial deepening* tersebut tercipta maka menunjukkan adanya peningkatan baik dalam hal peranan, kegiatan dan jasa-jasa keuangan terhadap perekonomian. Maksud dari istilah ini juga mengarah pada makin berkembangnya peran sektor keuangan dan semakin beragamnya pilihan jasa keuangan yang bisa diakses oleh masyarakat dengan cakupan yang semakin luas.

Perkembangan peran sektor keuangan dalam perekonomian dapat dilihat berdasarkan beberapa indikator yang terdapat pada Gambar 1.2



Gambar 1.2 Perkembangan Indikator *Financial Deepening*

Sumber: Worldbank Tahun 1980-2016 (diolah)

Berdasarkan Gambar 1.2 perkembangan indikator *financial deepening* M2/GDP dan CPS/GDP berfluktuatif mulai tahun 1980 sampai 2016. Sejak adanya reformasi keuangan pada tahun 1980-an mulai dari berlakunya Pakjun 1983 dan Pakto 1988 perkembangan M2/GDP dan CPS/GDP terus mengalami peningkatan. Selanjutnya indikator *financial deepening* pada sektor pasar modal dapat dilihat berdasarkan perkembangan indikator kapitalisasi pasar yang menunjukkan adanya peningkatan sejak pemberlakuan Pakdes 1988. Keadaan tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan ekonomi di Indonesia cukup efisien. Hal tersebut juga menunjukkan semakin efisien sistem keuangan dalam memobilisasi dana untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Semakin besar rasio jumlah uang beredar, penyaluran kredit perbankan, dan kapitalisasi pasar modal dalam perekonomian maka menunjukkan semakin besar dan meluas kegiatan lembaga keuangan. Selain itu, dari grafik tersebut juga terlihat adanya

penurunan pasca tahun 1997 dan 2008. Penurunan yang terjadi sebagai imbas dari krisis ekonomi.

Peningkatan dalam beberapa indikator *financial deepening* diharapkan akan dapat memberikan potensi pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan syarat sistem keuangan yang ada, khususnya di sektor perbankan dan pasar modal dapat menjalankan fungsi intermediasi dengan seoptimal mungkin. Dengan meningkatnya peranan bank maupun pasar modal tersebut maka pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi juga akan semakin besar (Ningrum,2015). Karena dampak dari transmisi kebijakan moneter dapat sampai ke perekonomian melalui lembaga intermediasi.

Peran sektor keuangan dalam perekonomian merupakan suatu hal yang penting untuk diketahui oleh pengambil keputusan. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi apabila sektor keuangan dianggap memiliki pengaruh, maka pemerintah perlu untuk mempromosikan perkembangan sektor keuangan yang diantaranya meliputi pengembangan sektor perbankan, lembaga non bank dan pasar modal. Namun sebaliknya akan menyebabkan pemborosan sumber daya apabila pemerintah menitikberatkan tujuannya pada pengembangan sektor keuangan apabila sektor keuangan tidak memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dana pembangunan tentunya akan lebih bermanfaat apabila dialokasikan untuk tujuan lain. Maka dari itu penulis mengangkat judul “*Analisis Financial Deepening Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah: Seberapa besar pengaruh dari perkembangan sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menggunakan indikator *financial deepening* sebagai salah satu gambaran dari sektor keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan maka manfaat yang didapatkan yaitu: Dapat mengetahui seberapa besar pengaruh dari sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi penulisan maka disusun dalam sistematik sebagai berikut:

1. Bab 1 Pendahuluan: merupakan gambaran awal dari keseluruhan proses penelitian yang berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematik penulisan.
2. Bab 2 Tinjauan Pustaka: mengemukakan tentang teori dan konsep yang berhubungan dengan variable-variabel dalam kajian penelitian, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.
3. Bab 3 Metode Penelitian: berisi tentang objek penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel dan teknik analisis data.
4. Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan: berisi gambaran dari hasil penelitian dan pembahasannya.

5. Bab 5 Kesimpulan dan Saran: berisi kesimpulan dan juga saran yang merupakan pemaknaan peneliti secara terpadu terhadap hasil penelitian yang telah di peroleh.